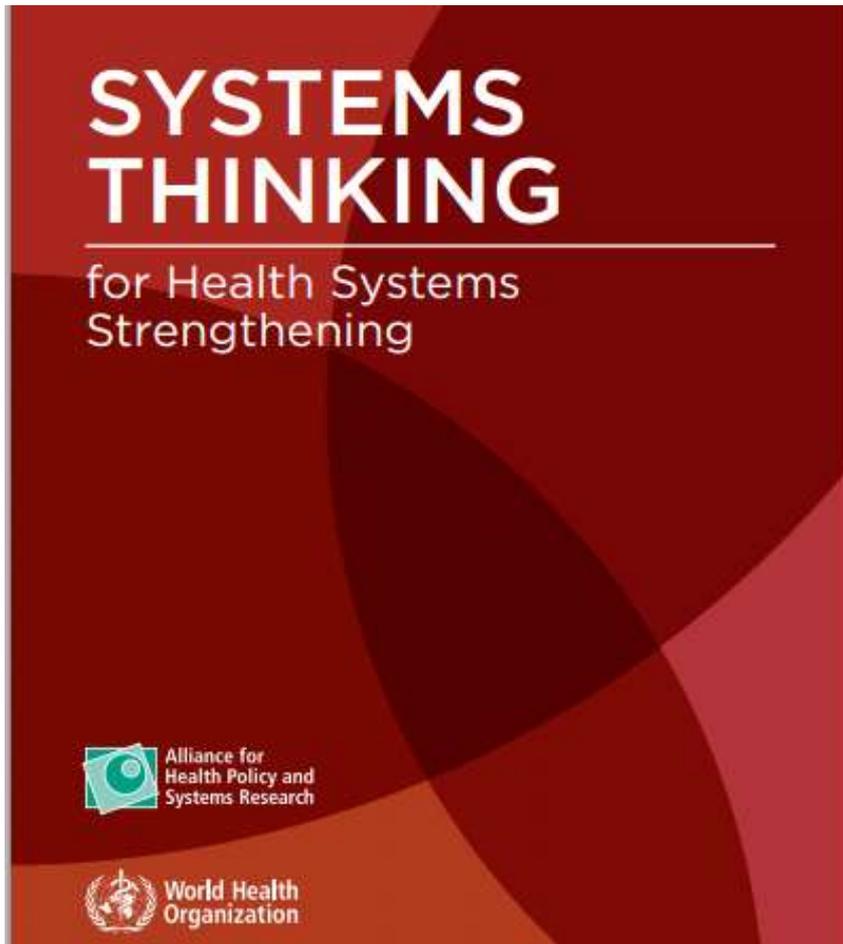


# PERAN JAMPERSAL DALAM MENINGKATKAN KESEHATAN REPRODUKSI MASYARAKAT

(Studi Kasus di Kecamatan Panjatan Kabupaten  
Kulon Progo)

Rina Nuryati, Mubasysyir Hasanbasri, Mohammad Hakimi  
MPH Manajemen dan Kebijakan Kesehatan, Universitas Gadjah Mada

# Penyusunan kebijakan



- Memakai pola pikir sistem
- Kebijakan baru harus mampu berintegrasi dengan kebijakan yang ada sebelumnya

# Definisi



REPRODUCTIVE HEALTH

“Keadaan di mana seseorang dapat memiliki kehidupan seks yang bertanggung jawab, memuaskan dan aman, mempunyai kemampuan bereproduksi dan bebas memutuskan kapan dan seberapa sering melakukannya”.

(WHO, diadopsi dari International Conference of Population Development, Kairo 1994)

*Jampersal dibuat untuk merespon kegagalan program-program yang selama ini dalam mendorong persalinan di tenaga profesional dan fasilitas kesehatan. Ia sebenarnya ditujukan untuk penduduk miskin tetapi dibuat universal untuk semua lapisan masyarakat.*



Paket pelayanan jampersal meliputi ANC, persalinan, PNC, dan KB pasca salin. Jampersal diharapkan dapat menurunkan kejadian 4 terlalu.

Pelayanan KB pasca salin saat ini belum banyak mendapat perhatian



Terlalu muda,  
terlalu tua

***Akankah  
Jampersal  
membantu  
meningkatkan  
kesehatan  
reproduksi  
masyarakat?***

Terlalu dekat



Terlalu  
banyak

# Kabupaten Kulon Progo, DIY



# Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui seberapa jauh  
peran Jampersal dalam  
meningkatkan kesehatan reproduksi  
masyarakat

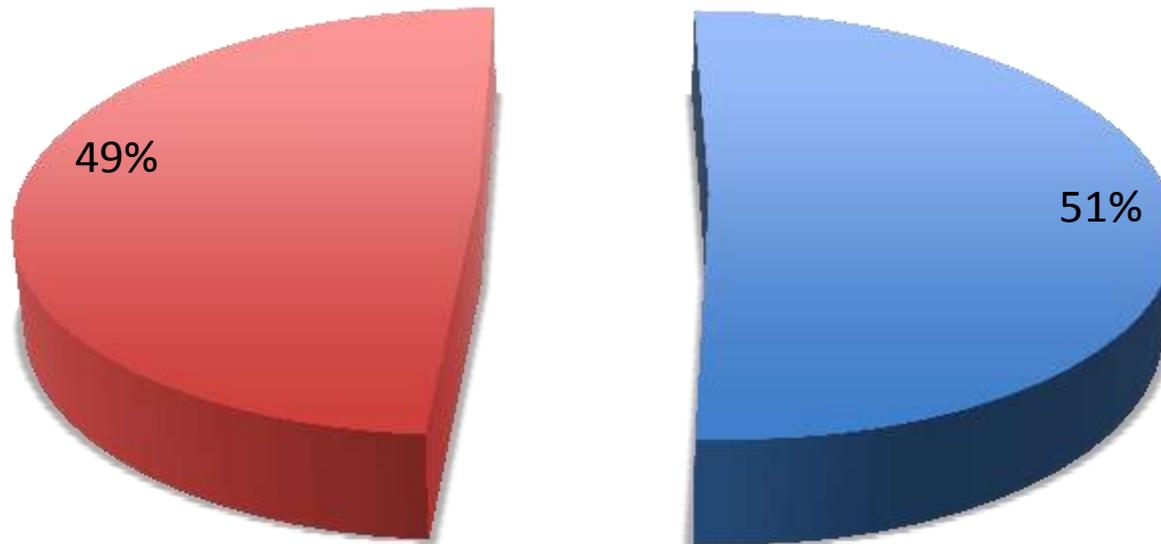
Metode

- Kualitatif
- Studi kasus
- Subjek : pasien Jampersal yang sudah melewati masa postpartum 42 hari (15 orang), bidan koordinator (2 orang), bidan praktek mandiri (1 orang), kepala puskesmas (2 orang), kasie kesga dinas kesehatan (1 orang)

Temuan

# Pemanfaatan Jampersal di Kab Kulon Progo tahun 2012

■ Jampersal ■ Lainnya



Sumber : Dinas Kesehatan KP

## CAKUPAN KEGIATAN KIA KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2012

Indikator	Target	Total Kabupaten	Jampersal
ANC			
• K1	100%	99.9%	77,2%
• K4	91%	90.8%	81,8%
Persalinan tenaga kesehatan	99.5%	99.6%	100%
PNC	96%	96.7%	76,28%
KB pasca salin	80%	35.5%	30,3%

# Alasan tidak melaksanakan KB pasca salin

- Khawatir terhadap efek samping
- Suami belum mengajak hubungan seks
- Repot mengurus anak
- Masih menyusui
- Kurangnya dukungan suami

# Konseling KB

- Konseling bidan belum optimal
- Jumlah pasien konseling oleh PLKB terbatas, namun yang dilakukan konseling oleh PLKB keberhasilan tinggi
- Kemampuan bidan dalam konseling masih kurang
- Bidan tidak bisa memaksa pasien untuk ber KB karena beranggapan bertentangan dengan kesehatan reproduksi

# Kegagalan Konseling KB pada peserta Jampersal

*“Penjelasan tentang KB hanya sebentar sih, sekedarnya saja tidak fokus ke sana. Kalau masalah KB hanya disinggung sedikit, hanya disarankan besok habis nifas KB ya bu...gitu.”*

*(Pasien Jampersal)*

*"Konseling itu yang penting jelas, singkat, nggak boleh lama-lama. Kalau saya paling 5 menit paling lama 10 menit nanti kalau kelamaan pasien bisa bosan"*

*Bidan praktek*

*“Kalau konseling itu lama bu,  
kadang satu pasien kita kunjungi  
dua sampai tiga kali”*

*Petugas Lapangan Keluarga Berencana*

Persepsi tentang KB pasca salin belum tepat

*“ ...kata bu bidan kalau mau KB suntik besok aja setelah 6 bulan, biar nggak pengaruh ke produksi ASI. Waktu 40 hari saya kontrol malah dikasih kondom. Tapi kemarin saya nanya lagi bidannya beda, kok boleh suntik, terus saya suntik..”*

*pasien Jampersal di puskesmas*

*“ Bu bidan waktu itu mengatakan nunggu sebulan atau dua bulan, biar istilahnya mapan dulu rahimnya, baru KB...”*

*pasien Jampersal di bidan praktek*

Kerancangan dengan sistem Jamkesda

“...kadang kita juga ngiguhke pasien ke Jamkesda karena syaratnya lebih mudah, pasien dapatnya lebih banyak, hanya menunjukkan KTP dan KK saja sudah dapat dilayani sebagai Jamkesda. Petugas juga lebih mudah untuk klaim”

Kepala Puskesmas, Bidan Koordinator

Kurangnya sinergi dengan kebijakan  
sebelumnya

“...dari Kementerian Kesehatan sendiri sudah ada program P4K yang keluar lebih dulu, di sana juga dikenalkan KB sampai pada pemilihan alat kontrasepsi setelah bersalin”

Kasie Kesga

“Kami orang KB diberi suatu program, kita nggak pernah pemaksaan misalnya anaknya mau lebih dari 2 monggo..asal pengaturan jarak dan lain-lain diperhitungkan. Tapi tetap yang kontra kita adalah berlawanan arah dengan BKKBN, sementara kita disuruh agar menekan jumlah penduduk tapi kok ada program pemerintah yang seperti itu, tidak ada batasan jumlah anak”

PLKB

*Jampersal baru memberi penekanan pada pelayanan kesehatan persalinan. Ia gagal menyatukan upaya kesehatan reproduksi, yang sesungguhnya sangat urgen pada kelompok penduduk miskin ini.*

# Saran

- Kebijakan tentang kesehatan reproduksi harus bersinergi dengan kebijakan terkait yang sudah ada sebelumnya
- Pemerintah daerah harus mempunyai otoritas untuk melaksanakan kebijakan pusat agar selaras dengan kebijakan daerah
- Diperlukan konseling yang berkualitas dan kemampuan provider yang handal agar tujuan kesehatan reproduksi tercapai.

Terima kasih

